

# Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Kelurahan Di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

Wahyuningtyas Mutiara Putri<sup>1</sup>, Rusbiyanti Sripeni<sup>2</sup>, Andri Hasgoro Kusumo Broto<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Merdeka Madiun, Jl Serayu 79, Madiun, 63133  
E-mail: akakteateo@gmail.com

<sup>2</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Merdeka Madiun, Jl Serayu 79, Madiun, 63133  
E-mail: rusbiyantisripeni@unmer-madiun.ac.id

<sup>3</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Merdeka Madiun, Jl Serayu 79, Madiun, 63133  
E-mail: andri@unmer-madiun.ac.id

**Abstract**— *This study aims to find out how far the implementation of transparency, accountability and participation of village finance management in Kartoharjo Subdistrict Madiun City. The research method used is qualitative method with descriptive approach. Respondents in this research are 52 kelurahan in manguharjo urban village. Data collection techniques used in the form of interviews, observations and questionnaires. Data obtained from the primary data by using questionnaires, data analysis techniques using multiple linear regression analysis with SPSS software program version 23.00 for windows and hypothesis testing is done by using the F test. The results of this study indicate that transparency positively influence on village financial management, while accountability and participation have no effect on the management of village finance.*

**Keywords**—: **Kelurahan Financial Management; Transparency; Accountability; Participatio.**

## I. PENDAHULUAN

Perbankan memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Aktifitas ekonomi muamalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah sangat dianjurkan untuk dijalankan umat islam. Bank Syariah memberikan alternatif solusi pembiayaan pada dunia usaha. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Undang-undang No. 21 Tahun 2008). Bank syariah memiliki beberapa program pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah, bai'us salam*, dan lain-lain. Kegiatan jasa bank umum syariah berupa akad *hiwalah, kafalah, ijarah*, dan lain-lain.

Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, antara lain disebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang kelurahan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Sumber pendapatan kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan, dalam pasal 9 ayat (1) bahwa keuangan kelurahan bersumber dari:

- a. APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
- b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan bantuan
- c. Pihak ketiga
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, pasal 3 ayat (1) menyatakan kelurahan merupakan perangkat daerah. Kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah kecamatan Kartoharjo, pada umumnya memerlukan bantuan keuangan dari pemerintah kota guna menunjang dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan termasuk biaya Operasional Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKMK/LKMD) dan TP-PKK Kelurahan yang juga memerlukan anggaran tersendiri guna mendukung Operasional kegiatannya. Salah satunya adalah Kecamatan Kartoharjo.

Untuk memberikan pedoman bagi pemerintah kelurahan dalam menyusun RPJM-kelurahan dan RKP-kelurahan perlu dilakukan pengaturan. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah kelurahan, yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, tentang kelurahan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kelurahan. Didalam perundang-undangan tersebut termuat azas pengelolaan keuangan daerah dan juga

kelurahan yang menyebutkan bahwa azas umum pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara transparan, akuntabel dan partisipasi.

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian terkait Pengelolaan Keuangan Kelurahan. Oleh sebab itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

Landasan teori

#### 1. Transparansi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 ayat 7, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut.

#### 2. Akuntabilitas

Dalam pasal 7 Undang- Undang No.28 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud, "Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/ rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

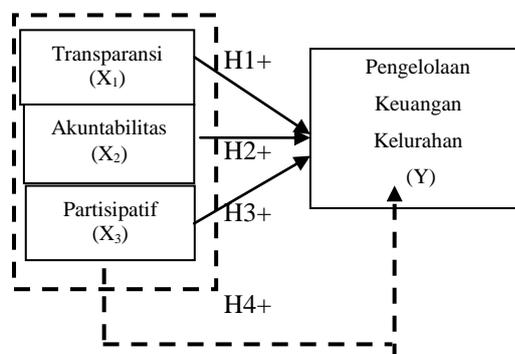
#### 3. Partisipasi

Menurut Mardiasmo (2002: 55), "Partisipasi adalah bentuk pengeikutsertaan komponen-komponen masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan". Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di kelurahan. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang.

#### 4. Pengelolaan Keuangan Kelurahan

Pengelolaan keuangan dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik, seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti membuat kerangka pemikiran dan hipotesis statistik sebagai berikut:



H1 : Transparansi secara parsial berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan kelurahan.

H2 : Akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan kelurahan.

H3 : Partisipasi secara parsial berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan kelurahan.

H4 : Variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan kelurahan.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut sugiyono (2016: 09) "penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi". Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk

menganalisis transparansi, akuntabilitas dan partisipasi terhadap pengelolaan keuangan kelurahan, studi kasus di wilayah Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

Adapun data yang digunakan Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada perangkat Kelurahan yang berada di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Serta data sekunder meliputi yaitu aturan dan kebijakan terkait pengelolaan keuangan Kelurahan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan angket (kuesioner) secara bertahap. Data sekunder berkaitan dengan data kebijakan hukum terkait pengelolaan keuangan kelurahan dan hasil penelitian terkait yang pernah dilakukan.

Karena dalam penelitian ini data yang digunakan hasil dari kuisisioner sehingga dalam teknik analisa datanya harus dilakukan pengujian menggunakan uji validitas untuk mengukur apakah sah/ layak atau tidaknya suatu kuisisioner untuk mengukur variabel yang diteliti dan uji reliabilitas untuk mengukur seberapa suatu kuisisioner itu dikatakan reliabel atau handal. adapun uji asumsi klasik dalam penelitian ini yaitu uji normalitas dan uji regresi linier berganda serta uji hipotesisnya dengan menggunakan uji t, uji F dan uji koefisien determinasi.

### III. PEMBAHASAN

Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah perangkat kelurahan beserta staf yang ada di kelurahan. Penelitian dilakukan pada kelurahan di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan hasil analisis dan pembahasan sebagai berikut:

**Tabel 1.** Rincian Penyebaran Dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner Yang Disebar	44
Kuesioner Yang Kembali	44
Kuesioner Yang Tidak Kembali	0
Kuesioner Yang Dapat Digunakan	44
Tingkat Pengembalian	100%

Sumber : data primer yang di olah tahun 2019

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa uji untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dan dependen yang diuraikan sebagai berikut:

#### A. Hasil Uji Reliabilitas

**Tabel 2.** Hasil Uji Reliabilitas Data Variabel X dan Y

No Item	Cronbach's Alpha	Kriteria	Kesimpulan
Transparansi	0,821	0,70	Reliabel
Akuntabilitas	0,830	0,70	Reliabel
Partisipasi	0,822	0,70	Reliabel
Pengelolaan Keuangan Kelurahan	0,869	0,70	Reliabel

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 2 maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki Cronbach's Alpha > 0,70 yaitu transparansi sebesar 0,821, Akuntabilitas sebesar 0,830, Partisipasi sebesar 0,822, serta pengelolaan keuangan kelurahan sebesar 0,869. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen tersebut adalah Reliabel (handal).

#### B. Hasil Uji Validitas

##### 1) Hasil Uji Validitas Transparansi ( $X_1$ )

**Tabel 3.** Hasil Uji Validitas Data Variabel Transparansi ( $X_1$ )

$X_1$	r hitung	r table	Kesimpulan
X1.1	0,824	0,1678	Valid
X1.2	0,783	0,1678	Valid
X1.3	0,775	0,1678	Valid
X1.4	0,769	0,1678	Valid
X1.5	0,674	0,1678	Valid

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 3 di atas, bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total konstruk menunjukkan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid (sah).

2) Hasil Uji Validitas Akuntabilitas ( $X_2$ )

**Tabel 4.** Hasil Uji Validitas Data Variabel Akuntabilitas ( $X_2$ )

$X_2$	r hitung	r table	Kesimpulan
X2.1	0,808	0,1678	Valid
X2.2	0,878	0,1678	Valid
X2.3	0,709	0,1678	Valid
X2.4	0,722	0,1678	Valid
X2.5	0,745	0,1678	Valid

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4 di atas, bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total konstruk menunjukkan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid (sah).

3) Hasil Uji Validitas Partisipasi ( $X_3$ )

**Tabel 5.** Hasil Uji Validitas Data Variabel Partisipasi ( $X_3$ )

$X_3$	r hitung	r table	Kesimpulan
X3.1	0,772	0,1678	Valid
X3.2	0,801	0,1678	Valid
X3.3	0,848	0,1678	Valid
X3.4	0,895	0,1678	Valid
X3.5	0,494	0,1678	Valid

Sumber : data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 5 di atas, bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total konstruk menunjukkan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid (sah).

4) Hasil Uji Validitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan (Y)

**Tabel 6.** Hasil Uji Validitas Data Variabel Pengelolaan Keuangan Kelurahan (Y)

Y	r hitung	r tabel	Kesimpulan
Y.1	0,814	0,1678	Valid
Y.2	0,847	0,1678	Valid
Y.3	0,848	0,1678	Valid
Y.4	0,734	0,1678	Valid
Y.5	0,826	0,1678	Valid

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 6 di atas, bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total konstruk menunjukkan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid (sah).

**C. Uji asumsi klasik**

1) Hasil Uji Multikolonieritas

Ada atau tidaknya multikolonieritas pada masyarakat kelurahan di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dapat dilihat pada tabel 7

**Tabel 7.** Hasil Uji pengujian multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
TRANSPARANSI	.828	1.208
AKUNTABILITAS	.910	1.099
PARTISIPASI	.765	1.307

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
TRANSPARANSI	.828	1.208
AKUNTABILITAS	.910	1.099
PARTISIPASI	.765	1.307

a. Dependent Variable:

Pengelolaan Keuangan Kelurahan

Sumber : data primer yang diolah, 2019.

Hasil uji multikolonieritas pada tabel 7 menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini mempunyai nilai *tolerance* > 0,10 atau variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* < 0,10 dan semua variabel memiliki nilai VIF > 10. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian.

2) Hasil Uji Autokorelasi

Untuk melihat ada tidaknya autokorelasi maka dilakukan dengan uji *Runs Test* sebagai berikut :

**Tabel 8.** Hasil Uji Autokorelasi  
**Uji Runs Test**

**Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-,01844
Cases < Test Value	22
Cases >= Test Value	22
Total Cases	44
Number of Runs	22
Z	-,153
Asymp. Sig. (2-tailed)	,879

a. Median

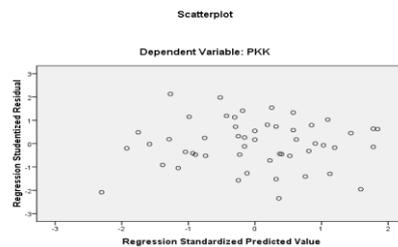
Sumber : data primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan hasil Uji *Runs Test* pada tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig* adalah sebesar 0,879. Batas nilai *Asymp. Sig* untuk terbebas dari autokorelasi adalah sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi.

3) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel (ZPRED) dengan residual (SRESID). Berikut adalah hasil dari uji heteroskedastisitas.

**Tabel 9.** Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : data primer yang diolah, 2018.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 9 tersebut dapat diketahui bahwa titik-titik tersebut tidak membentuk pola melebar, menyempit dan atau bergelombang, namun dari hasil diatas terlihat bahwa titik-titik tersebut menyebar tidak beraturan sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4) Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* dengan cara membandingkan nilai probabilitas (*p-value*) yang diperoleh dengan taraf signifikan yang sudah ditentukan yaitu sebesar 0,05 maka  $H_0$  diterima yang berarti variabel berdistribusi normal. jika probabilitas < 0,05 maka  $H_0$  ditolak yang berarti variabel tidak berdistribusi normal. hasil pengujian normalitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Hasil Uji Statistik *Kolmogorof- Smirnov Test*  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.63106602
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.052
	Negative	-.088
Kolmogorov-Smirnov Z		.633
Asymp. Sig. (2-tailed)		.818

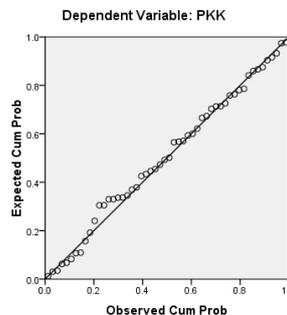
a. Test distribution is Normal.

Sumber : data primer yang diolah, 2018.

Berdasarkan hasil pengujian normalitas data dengan uji statistik *Kolmogorof- Smirnov Test* diatas pada tabel 10 menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,986 > 0,05. Sehingga  $H_0$  diterima bahwa data tersebut normal.

Tabel 11. Hasil Uji Statistik *Kolmogorof- Smirnov Test*

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : data primer yang diolah, 2018.

Hasil Uji Statistik *Kolmogorof- Smirnov Test* pada grafik 11 dapat disimpulkan bahwa data tersebut menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal.

**D. Teknik Analisa Data**

1) Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Uji analisis regresi digunakan untuk mengetahui koefisien-koefisien regresi serta signifikansi sehingga dapat menjawab hipotesisi. Berikut adalah hasil dari uji regresi linier berganda:

Tabel 12. Hasil uji analisis regresi linier berganda

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	14,344	4,753		3,018	,004		
TRANSPARANSI	,585	,174	,515	3,357	,002	,828	1,208
AKUNTABILITAS	-,033	,163	-,030	-,205	,838	,910	1,099
PARTISIPASI	-,264	,189	-,223	-1,399	,170	,765	1,307

a. Dependent Variable: Y

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Metode regresi linier berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hubungan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi terhadap pengelolaan keuangan kelurahan. Model persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = A + B_1 X_1 + B_2 X_2 + B_3 X_3$$

$$Y = 14,344 + 0,585 X_1 - 0,033 X_2 - 0,264 X_3$$

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Koefisien konstanta berdasarkan hasil regresi adalah 14,344 menunjukkan bahwa jika kita transparansi, akuntabilitas, partisipasi adalah nol, maka nilai pengelolaan keuangan kelurahan (Y) adalah sebesar 14,344.
- Koefisien regresi variabel Transparansi ( $X_1$ ) sebesar 0,585 dan positif artinya setiap kenaikan transparansi sebesar 1 satuan akan menaikkan pengelolaan keuangan kelurahan (Y) sebesar 0,585 satuan.
- Koefisien regresi variabel Akuntabilitas ( $X_2$ ) sebesar -0,033 dan negatif artinya setiap kenaikan akuntabilitas 1 satuan akan menurunkan pengelolaan keuangan kelurahan (Y) sebesar -0,033 satuan.
- Koefisien regresi variabel partisipasi ( $X_3$ ) sebesar -0,264 dan negatif artinya setiap kenaikan partisipasi 1 satuan akan menurunkan pengelolaan keuangan kelurahan (Y) sebesar -0,264 satuan.

2) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Berikut adalah hasil dari pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 13 :

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi  $R^2$

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.470a	.221	.162	2.91081

a. Predictors: (Constant), PARTISIPASI, AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI

b. Dependent Variable: PKK

Sumber : data primer yang diolah, 2018.

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 13 bahwa nilai  $R^2$  sebesar 0,221 atau 22%. Hal ini berarti variabilitas variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 22%. Sedangkan sisanya 73% ( $100\% - 22\% = 78\%$ ) dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diuji dalam penelitian ini dan faktor lain diluar penelitian ini. Misalnya seperti pengetahuan pengelolaan keuangan kelurahan, perencanaan, pelaksanaan pengelolaan keuangan kelurahan dan sebagainya.

3) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Tabel 14. Hasil Uji Signifikansi (Uji t) Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
1 (Constant)	14.344	4.753		3.018	.004		
TRANSPARANSI	.585	.174	.515	3.357	.002	.828	1.208
AKUNTABILITAS	.033	.163	-.030	-.205	.838	.910	1.099
PARTISIPASI	.264	.189	-.223	-1.399	.170	.765	1.307

a. Dependent Variable: Y

Sumber : data primer yang diolah, 2018.

a) Pengaruh Transparansi ( $X_1$ )

Berdasarkan tabel 14 variabel transparansi memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3.357 dan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Tingkat signifikansi sebesar  $0,002 < 0,05$  artinya variabel Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan Kelurahan di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Hal ini sesuai dengan:  $H_1$  yang menyatakan transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan kelurahan.

b) Pengaruh Akuntabilitas ( $X_2$ )

Berdasarkan tabel 14 variabel akuntabilitas memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0,205 dan tingkat signifikansi sebesar 0,838. Tingkat signifikansi sebesar  $0,838 > 0,05$  artinya variabel Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Kelurahan di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Hal ini tidak sesuai dengan:

$H_2$  yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan kelurahan.

c) Pengaruh Partisipasi ( $X_3$ )

Berdasarkan tabel 14 variabel partisipasi memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar -1,399 dan tingkat signifikansi sebesar 0,170. Tingkat signifikansi sebesar  $0,170 > 0,05$  artinya variabel Partisipasi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Kelurahan di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Hal ini tidak sesuai dengan:

$H_2$  yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan kelurahan.

4) Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 15. Hasil Uji F Uji Signifikansi Simultan (Uji F) ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	95.996	3	31.999	3.777	.018
Residual	338.913	40	8.473		
Total	434.909	43			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	95.996	3	31.999	3.777	.018
Residual	338.913	40	8.473		
Total	434.909	43			

b. Dependent Variable: PKK

Berdasarkan hasil uji F tabel 15 dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan sebesar 0.000. Nilai 0,018 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Transparansi, Akuntabilitas, dan partisipasi secara bersama-sama (simultan) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan kelurahan.

### E. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan menguji pengaruh antara variabel Transparansi ( $X_1$ ), Akuntabilitas ( $X_2$ ), Partisipasi ( $X_3$ ) terhadap pengelolaan keuangan kelurahan di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

#### 1. Pengaruh Transparansi ( $X_1$ ) terhadap pengelolaan keuangan kelurahan (Y)

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa variabel Transparansi ( $X_1$ ) diperoleh tingkat signifikansi t sebesar  $0,002 < 0,05$  yang artinya transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan kelurahan. Dengan demikian  $H_1$  diterima. Transparansi yang artinya mengidentifikasi adanya pengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan kelurahan. Dengan demikian  $H_1$  diterima.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian dari Sugista (2017) yang menemukan bahwa variabel Transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi aktifitas Transparansi, maka akan semakin tinggi pula pengelolaan keuangan kelurahan yang dihasilkan. Didalam aktivitas Transparansi, seluruh komponen terlibat dalam proses ini baik pegawai kelurahan maupun masyarakat sehingga terjadi umpan balik yang baik sesuai tujuan.

#### 2. Pengaruh Akuntabilitas ( $X_2$ ) terhadap pengelolaan keuangan kelurahan (Y)

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa variabel Akuntabilitas ( $X_2$ ) diperoleh tingkat signifikansi t sebesar  $0,838 > 0,05$  yang artinya mengidentifikasi adanya pengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan kelurahan. Dengan demikian  $H_2$  ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas ( $X_2$ ) tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan kelurahan. Aktivitas akuntabilitas perlu diketahui tentang keakuratan dalam menyusun laporan keuangan. Sehingga harus mengadakan adanya keselarasan dengan perencanaan dengan memasukkan informasi terkini. Jadi akuntabilitas harus dilakukan secara teliti apakah sudah lengkap atau belum, jika akuntabilitas yang di pakai tidak bisa/belum bisa dikatakan akurat harus diberikan alternatif atau solusi tentang akuntabilitas/pertanggungjawaban supaya dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin rendahnya aktivitas akuntabilitas pengelolaan keuangan kelurahan mengakibatkan tidak adanya pengaruh terhadap pengelolaan keuangan kelurahan. Dikelurahan akuntabilitas berupa laporan pertanggungjawaban program yang telah dilaksanakan. Hasil dari penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian Sugisya (2017) dan umami dan nurodin (2017) yang menemukan bahwa variabel Akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

#### 3. Pengaruh Partisipasi ( $X_3$ ) terhadap pengelolaan keuangan kelurahan (Y)

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa variabel Partisipasi ( $X_3$ ) diperoleh tingkat signifikansi sebesar  $0,170 > 0,05$  yang artinya mengindikasikan bahwa partisipasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan kelurahan. Dengan demikian  $H_3$  ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi ( $X_3$ ) tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan kelurahan. Aktivitas Partisipasi perlu diketahui tentang keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan oleh kelurahan. Partisipasi masyarakat dalam kelurahan berupa goyong royong untuk membangun kelurahan. Sehingga harus mengadakan adanya gotong royong dengan perencanaan yang matang dan lebih bermanfaat. Jadi Partisipasi harus dilakukan secara aktif apakah sudah ada/belum, jika Partisipasi yang di pakai tidak bisa/belum bisa dikatakan akurat harus diberikan alternatif atau solusi tentang partisipasi supaya dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Hal ini berarti bahwa semakin rendahnya aktivitas partisipasi pengelolaan keuangan kelurahan mengakibatkan tidak adanya pengaruh terhadap pengelolaan keuangan

kelurahan. Hasil dari penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian Sugista (2017) dan umami dan nurodin (2017) yang menemukan bahwa variabel Partisipasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

4. *Pengaruh Transparansi ( $X_1$ ), Akuntabilitas ( $X_2$ ), dan Partisipasi ( $X_3$ ) terhadap Pengelolaan Keuangan Kelurahan (Y)* Berdasarkan uji statistik F dapat dilihat nilai signifikansinya sebesar 0,000. Nilai  $0,018 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas Transparansi ( $X_1$ ), Akuntabilitas ( $X_2$ ), dan Partisipasi ( $X_3$ ) terhadap Pengelolaan Keuangan Kelurahan (Y).

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian, pengajuan hipotesis dan pembahasan pada penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Variabel Transparansi ( $X_1$ ), berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan kelurahan.
2. Variabel Akuntabilitas ( $X_2$ ), tidak berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan kelurahan.
3. Variabel Partisipasi ( $X_3$ ), tidak berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan kelurahan.
4. Secara simultan Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Kelurahan (Y)

#### A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka disampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah kelurahan  
Tetap mempertahankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan kelurahan di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun yang telah diimplementasikan agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.
2. Perbaikan secara terus menerus merupakan fokus dari pengelolaan keuangan kelurahan dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan terbaru. Agar pemerintah kelurahan dapat mengelola anggaran dengan baik terutama mengelola keuangan kelurahan.
3. Fokus terhadap masyarakat sebagai subyek penggunaan keuangan kelurahan. Pemerintah kelurahan diharapkan lebih akuntabel lagi terhadap penggunaan keuangan kelurahan, memasang abggaran pengeluaran dan pemasukan untuk pembangunan kelurahan ke papan pengumuman atau papan informasi di setiap kegiatan yang dilaksanakan.

#### B. Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Dikarenakan adanya keterbatasan dalam penelitian ini maka perlu dilakukan penyempurnaan. Untuk itu terdapat rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan masyarakat sebagai responden, untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambah responden seperti perangkat kelurahan.
2. Responden dalam penelitian ini hanya 44 responden, untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambah jumlah responden lebih dari 44.
3. Bagi peneliti selanjutnya, Penulis mengharapkan untuk penelitian selanjutnya agar lebih memperbanyak kelurahan yang akan diteliti untuk pengelolaan keuangan kelurahan dan berbagai variabel lainnya.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Faridah & suryono, 2015. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 4, No.1.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi Kelima. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, 2012. *Pengelolaan keuangan daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.  
[http://kawasan.bappenas.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=117&Itemid=113](http://kawasan.bappenas.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=113). diakses pada tanggal 30 januari 2017 pukul 03.30
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan>. diakses pada tanggal 30 januari 2017 pukul 03.00
- <https://info-anggaran.com/ensiklopedia/musrenbang-kelurahan/> diakses pada tanggal 30 januari 2017 pukul 04.00
- <https://www.slideshare.net/so3p/peraturan-pemerintah-no-73-tahun-2005-tentang-kelurahan-42252615> diakses pada tanggal 30 januari 2017 pukul 08.00
- Kumalasari & Riharjo, 2016. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal ilmu dan Riset Akuntansi* Vol.5, No.1.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi sektor publik*. Edisi pertama. Yogyakarta : ISBN: 979-533-713-0
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi kedua. Yogyakarta : ISBN: 979-731-544-4
- Republik Indonesia, 1999, "Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme". Jakarta
- Republik Indonesia, 2004, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah", Jakarta.
- Republik Indonesia, 2004, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah". Jakarta
- Republik Indonesia, 2005, "Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan". Jakarta
- Republik Indonesia, 2005, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah". Jakarta
- Republik Indonesia, 2006, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah". Jakarta
- Republik Indonesia, 2016, "Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kelurahan". Madiun

Sugista, Rizky Amalia 2017. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa*.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Umami & nurodin, 2017. *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*. *Jurnal ilmiah ekonomi*. Vol.6, hal 2- 3.

Widiyanti, 2017. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa hal 1